

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan



Gambar 2.1 Logo Perusahaan

Sejarah Singkat Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kementerian ini didirikan pada tahun 1945, seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tujuan utama pendiriannya adalah untuk mendukung pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Sejak awal kementerian PUPR berkomitmen untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada tahun 1960-an, kementerian PUPR Mulai fokus pada pengelolaan sumber daya air, yang dianggap vital untuk pertanian dan kebutuhan masyarakat. Dalam periode ini, berbagai proyek besar dibangun, termasuk bendungan dan sistem irigasi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian PUPR tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan Sumber Daya Alam.

Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 2000, Kementerian PUPR dibagi menjadi dua Kementerian terpisah, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Namun, untuk meningkatkan efektivitas

pengelolaan infrastruktur, kedua kementerian ini kembali digabung pada tahun 2014. penggabungan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam perencanaan dan implementasi program-program pembangunan, khususnya dalam pengelolaan Sumber Daya Air.

Direktorat Jenderal Sumber daya Air (DJSD) didirikan sebagai bagian dari kementerian PUPR untuk fokus pada pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Air di Indonesia. DJSD memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Sumber Daya Air untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Dalam menjalankan tugasnya, DJSD juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintahan daerah dan masyarakat, dalam upaya pengelolaan yang berkelanjutan.

Hingga saat ini kementerian PUPR dan DJSD terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan pengelolaan Sumber daya Air. Dengan berbagai program dan inovasi yang ditetapkan, diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat indonesia secara menyeluruh. Melalui dedikasi dan komitmen semua pihak, Kementerian PUPR berusaha menjadi lembaga yang mampu menjawab tantangan pembangunan infrastruktur di era modern ini .

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Magang Perusahaan

No	Nama	Departemen	Periode
1.	Kennyta Aulia Zahra	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Sungai dan Pantai, Subbag Tata Usaha, umum dan kepegawaian	04 March 2025 - 11 July 2025

(Sumber olahan peneliti, 2025)

2.1.1 Visi Misi

Visi Kementerian Pekerjaan Umum

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan tanggap kepada presiden dan wakil presiden dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan prasarana.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada presiden dalam penyelenggaraan pembangunan prasarana sumber daya air, perhubungan, perumahan, dan pemukiman dalam rangka pembangunan prasarana wilayah secara terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang manajemen, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan prasarana pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum

Direktorat Sumber Daya Air sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung terlaksananya visi kementerian tersebut melalui pelaksanaan misi kedua, yaitu memberikan dukungan teknis dan administratif kepada presiden dalam menyelenggarakan pembangunan prasarana Sumber Daya Air, perhubungan, perumahan dan permukiman dalam rangka Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan mantra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

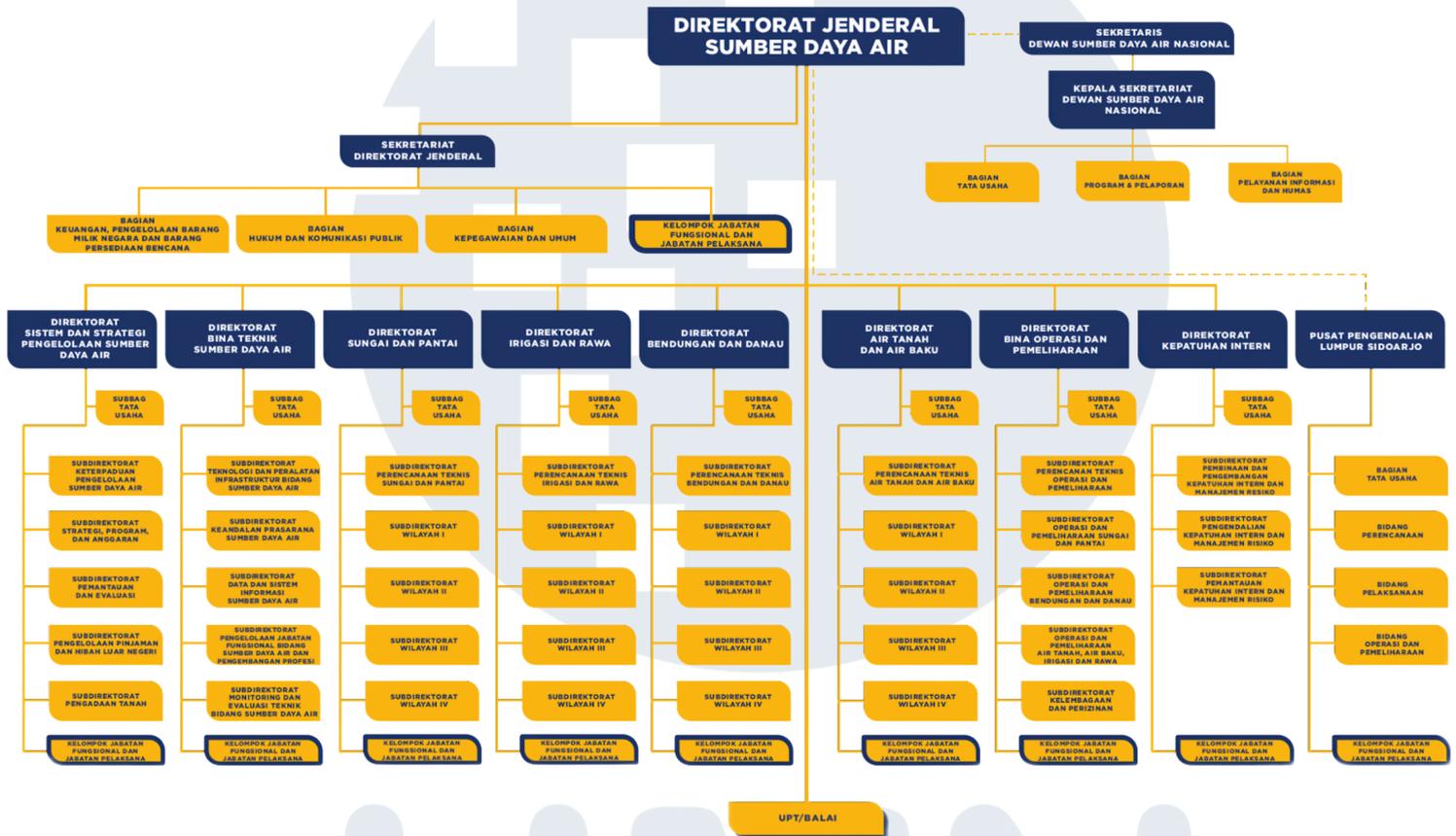
1. Terselenggaranya penataan ruang sebagai acuan mantra tata ruang pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pekerjaan umum dan

pembangunan prasarana permukiman berbasis tata ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan
4. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang
5. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penerapan IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman
6. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip prinsip permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip prinsip good governance.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik praktik KKN di lingkungan kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

2.2 .Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.2 Struktur Organisasi DJSD

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DJSD) Kementerian Pekerjaan Umum, memiliki susunan organisasi yang sangat terstruktur, kompleks dan jelas. DJSD merupakan salah satu lembaga strategis di Kementerian Pekerjaan Umum, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdiri dari beberapa level yang saling terkonsolidasi, yaitu mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat unit pelaksanaan teknis daerah, mulai dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Setelah itu

terdapat Sekretariat Jendral yang dimana berfungsi sebagai penghubung administrasi dan juga koordinasi antara DJSD dan Unit unit di bawahnya, seperti terdapat Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air, Direktorat Sungai dan Pantai, Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat bendungan dan Danau, Direktorat Air Tanah dan Air Baku, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat kepatuhan Intern, dan yang terakhir yaitu Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di kementerian Pekerjaan Umum ini dirancang sedemikian rupa untuk dapat mendukung pengelolaan sumber daya air yang efektif serta berkelanjutan.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha di Direktorat Sungai dan Pantai memiliki peran yang penting dalam mendukung kelancaran operasional di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sungai dan Pantai. Pada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Sungai dan Pantai dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dimana beliau bertanggung jawab untuk dapat mengkoordinasikan semua kegiatan administrasi

di sub bagian ini, dan juga mempunyai tugas seperti melakukan pengawasan, meliputi perencanaan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf. Kasubbag juga memiliki peran sebagai penghubung antara Sub Bagian Tata Usaha dengan unit-unit lainnya di Direktorat Sungai dan Pantai. Di Bawah Kasubbag terdapat staf-staf dengan berbagai macam posisi jabatan seperti, Pengadministrasi Umum yang mempunyai tanggung jawab dalam mengelola dokumen dan administrasi umum, termasuk pengaturan surat menyurat, penyimpanan arsip serta dukungan administratif untuk kegiatan lain di sub bagian. pada Pengadministrasi Umum memastikan bahwa semua dokumen sudah terorganisir dengan baik dan juga dapat mudah diakses. Selanjutnya terdapat Analisis SDM Aparatur/Pembina Kepegawaian yang dimana mempunyai tugas seperti mengelola dan menganalisis data terkait sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Sungai dan Pantai. Tugas ini mencakup pengumpulan data pegawai, evaluasi kinerja pegawai, dan pengembangan program pelatihan serta peningkatan kompetensi kepegawaian. Pada Arsiparis Ahli Pertama mempunyai tugas mengelola sistem pengarsipan dan penyimpanan dokumen penting, mengelola surat masuk, surat keluar, daftar isi berkas, tugas ini termasuk pengorganisasian arsip, pemeliharaan dan memastikan bahwa semua dokumen dapat diakses dengan mudah dan cepat jika diperlukan, selain itu Arsiparis juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data dan informasi yang ada. Setelah Arsiparis terdapat Pengelola BMN yang dimana bertanggung jawab untuk dapat mengelola barang milik negara yang ada di lingkungan Direktorat Sungai dan Pantai, Tugas lainnya juga mencakup pemeliharaan, pencatatan serta pengawasan terhadap penggunaan barang milik negara agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengelola BMN juga mempunyai tugas untuk dapat melaporkan kondisi barang secara berkala. Di posisi jabatan Pengatur sarana Kantor bertugas mengatur serta memastikan semua sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik dan juga dapat siap pakai, tugas ini meliputi pengadaan, pemeliharaan, serta pengelolaan fasilitas kantor untuk mendukung kelancaran kegiatan administrasi, selain itu juga bertanggung jawab untuk dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan sarana kantor. Yang terakhir yaitu

pengemudi yang dimana mempunyai tanggung jawab untuk dapat mengoperasikan kendaraan dinas yang digunakan oleh pegawai di Subbagian Tata usaha dan juga Direktorat Sungai dan Pantai, pengemudi memastikan kendaraan dalam keadaan baik dan aman untuk digunakan, serta siap dalam mendukung mobilitas pegawai untuk melaksanakan tugas tugas mereka atau tugas dinas.

Struktur organisasi pada Sub Bagian Tata Usaha di Direktorat Sungai dan Pantai dirancang untuk bisa memastikan kelancaran serta efisiensi dalam pengelolaan administrasi, yang dimana setiap anggota tim memiliki peran yang spesifik dan saling melengkapi sehingga mereka bisa dapat bekerja sama secara efektif untuk dapat mendukung tugas dan fungsi Direktorat. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, maka sub bagian tata usaha pada Direktorat Sungai dan Pantai ini dapat memberikan kontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan Direktorat Sungai dan Pantai.

